

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMETERA SELATAN

Oleh

Kusnadi Yudha Wiguna

kusnadi.yudha@co.id

Abstract

This research related to the financial performance of local government districts/cities in the South Sumatra province, which need to be enhanced by the presence of regional autonomy (fiscal decentralization). Local government needs to build and manage public financial accounting system of their own. Many factors can affect the financial performance of local governments. This study aimed to know whether the level of local government wealth proxied by the ratio of the locally-generated revenue (PAD), the dependence of local governments on the central government to the ratio proxied by General Allocation Fund (DAU), and the level of capital expenditures of local governments may improve financial performance of local governments, as measured by the ratio of financial efficiency. By using multiple regression analysis in 15 local government districts/cities in the South Sumatra province from 2018 up to 2012 with 75 sample observations, this study proves that the level of dependency of local governments (DAU) gave positive significant effect on the efficiency (performance) of local government finance, while the level of regional wealth (PAD ratio of the total expenditure areas), and the level of capital expenditures of local government (the ratio of capital expenditure to total expenditure areas) do not significantly affect the efficiency (performance) of local government finance district/city in the province of South Sumatra, while simultaneously affect the efficiency (performance) of local government finance with adjusted R^2 value 0.203135.

Keywords: Locally-Generated Revenue, General Allocation Fund, and Local Government Capital Expenditure, Performance of Local Government Finance.

Pendahuluan

Otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkonsentrasi di pusat.

Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antar daerah di Indonesia (Adi, 2006). Kesenjangan ini muncul berkaitan dengan adanya sumbangan akan hasil eksploitasi sumber daya terhadap

pembangunan ekonomi yang hanya berkutat di pusat (Kuncoro, 2004). Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi, 2005).

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi,

transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 30 – 32 tentang Keuangan Negara mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan Rancangan Undang-Undang/Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan Negara/Daerah dan badan lainnya. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara

internal maupun eksternal. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan (Nordian dan Hertianti, 2010). Wood (1998) mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yaitu rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan rasio efisiensi dalam mengukur kinerja keuangan daerah sebagai variabel dependen dikarenakan rasio efisiensi terkait dengan alokasi penggunaan sumberdaya ekonomi yaitu menggunakan sumberdaya ekonomi yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah), belanja pembangunan, dan dana perimbangan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh tingkat kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah yang diprosikan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (*intergovernmental revenue*) yang di proksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan menggunakan rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Kajian Pustaka dan Hipotesis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Bastian (2010), mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Penelitian yang dilakukan Azhar (2008) mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007).

Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Mahsun, 2006). Khusus dalam bidang keuangan daerah, penilaian efisiensi keuangan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Sularso dan,

Hamzah (2008), Susanto (2010); Hidayat (2013); Marfiana dan Kurniasih (2011).

Apabila kinerja keuangan (efisiensi keuangan) di atas atau sama dengan 100% dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80 - 90% adalah cukup efisien, 60 - 80 adalah efisien, dan dibawah atau sama dengan dari 60% adalah sangat efisien (Sularso dan Restianto (2011).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melihat tingkat efisiensi keuangan pemerintah daerah tersebut, rasio efisiensi terkait dengan alokasi penggunaan sumberdaya ekonomi yaitu menggunakan sumberdaya ekonomi yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2004). Mustikarini dan Fitriasisi (2012) menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan daerah. Puspita dan Martani (2012), menggunakan PAD dibandingkan dengan total realisasi pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan daerah. Liestiani (2008) menggunakan PAD per kapita sebagai proksi untuk menjelaskan kekayaan daerah. Penelitian ini menggunakan proksi PAD dibandingkan dengan total pendapatan dalam pengukuran tingkat kekayaan daerah karena meskipun kontribusi PAD kecil terhadap pendapatan pemerintah daerah di Indonesia, PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri (Suhardjanto, *dkk*, 2010).

Rasio ini juga menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2011). Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Dengan lancarnya penyelenggaraan urusan daerah maka Pemerintah akan memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah juga memiliki PAD yang beragam yang salah satunya tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Pemerintah daerah yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya juga diharapkan semakin baik (Mustikarini dan Fitriasisi, 2012).

Dana Alokasi Umum

Pada Negara berkembang menunjukkan bahwa masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau disebut *intergovernmental Revenue* (Kelly, 2010). Pendapatan pemerintah dari sumber eksternal (*intergovernmental Revenue*)

adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Patrick, 2007). *Intergovernmental Revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto dkk., 2010). Proksi dari Dana Perimbangan dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara total DAU dengan total pendapatan. Pada penelitian Mustikarini dan Fitriasisi (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat (pendapatan pemerintah dari sumber eksternal) dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima setiap pemerintah daerah. Puspita dan Martani (2012), rasio tingkat ketergantungan diukur dengan besarnya DAU dibandingkan dengan total realisasi anggaran pendapatan, semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi (Mahmudi, 2011). Menurut PP No.55 tahun 2005, DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Yustikasari (2007) Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lainnya.

Setiap pemerintah daerah akan mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang beragam disesuaikan dengan keadaan dari masing-masing pemerintah daerah. Pemberian DAU akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah

pusat. Oleh karena itu, semakin besar DAU maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga hal ini diharapkan akan membuat pemerintah daerah semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Dengan demikian, semakin besar DAU akan membuat kinerja pemerintah daerah semakin baik (Mustikarini dan Fitriasi, 2012).

Belanja Modal

Analisis belanja modal terhadap total belanja daerah merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini untuk menunjukkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Belanja modal tidak bersifat rutin, pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah yang rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki aset modal yang mencukupi. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5 – 10 persen (Mahmudi, 2010).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Menurut Halim (2007), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta

akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan belanja modal pemerintah daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasionalisasi Variabel

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006). Rasio efisiensi yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Penghitungan rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Medi, (1966) dalam Budiarto, (2007); Sularso dan Restianto (2011); Hamzah (2008); Bisma dan Susanto (2010); Hidayat (2013); Marfiana dan Kurniasih (2011). Rasio efisiensi keuangan daerah diukur dengan; Realisasi Pengeluaran (*output*) / Realisasi Penerimaan (*input*) x 100%

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri

dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD Yang Sah (Darise, 2008). Proksi untuk mengukur tingkat kekayaan pemerintah daerah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasisi (2012), dan Puspita dan Martani (2012) menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang dikelompokkan: PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Rasio PAD = $(\text{PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$

Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi tingkat kekayaan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (otonomi daerah), dan sebaliknya.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sedangkan pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) diukur dengan perbandingan DAU terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau provinsi, dan sebaliknya.

Belanja Modal

Belanja modal adalah total belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan menyatakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Dimana realisasi belanja modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Pengukuran belanja modal menggunakan perbandingan belanja modal dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Rasio ini untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang dan bersifat tidak rutin. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi tingkat investasi aset modal yang dilakukan pemerintah daerah, dan sebaliknya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008 – 2012 yang terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota dengan data/sampel penelitian sebanyak 75 observasi sebagai sampel dalam penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id) di Internet.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah regresi data panel (*pooled data*). Model persamaan regresi yang digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menentukan pendekatan/metode dalam estimasi regresi data panel, prosedur yang dilakukan dalam estimasi regresi data panel adalah *Likelihood Ratio* (uji CHOW) dan uji Hausman.

Likelihood Ratio (Pooled Least Squared vs Fixed Effect Model)

Likelihood Ratio (Uji Chow) untuk mengetahui apakah model yang akan digunakan adalah *Fixed Effects Model* atau *Common Constant*. Uji ini dilakukan dengan prosedur uji *F-stat* dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Model PLS (*Restricted*)

H1 : Model *Fixed Effect (Unrestricted)*

Dari hasil regresi berdasarkan metode *Fixed Effect Model* dan *Pool Least Square* diperoleh F-statistik yakni:

Redundant Fixed Effects Tests

Test period fixed effects

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|-------------------|-----------|--------|--------|
| Period F | 3.133294 | (4,67) | 0.0201 |
| Period Chi-square | 12.861123 | 4 | 0.0120 |

Sumber: data sekunder diolah, 2014

Berdasarkan pengujian diketahui nilai *cross-section F* statistik sebesar 3.133294. Dengan membandingkan *F* statistik (3.133294) yang lebih besar daripada *F* tabel (2,73), maka kesimpulan dari hasil pengujian adalah menolak H₀.

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa probabilitas adalah sebesar 0.0201. Dengan nilai *p-value* yang lebih kecil dari α (0,05), maka kesimpulan dari hasil *Likelihood Ratio Test* (Uji Chow) adalah menolak H₀ dan menerima H₁, sehingga model yang lebih baik digunakan adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Namun hal tersebut belum

merupakan hasil akhir atas metode pengolahan data karena belum teruji secara statistik. Maka perlu dilihat hasil yang ada dari metode lain yaitu metode *Random Effects* dan pengujiannya secara statistik.

Uji Hausman (Fixed Effect vs Random Effect)

Uji Hausman digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan hipotesis panel yang akan digunakan, maka digunakan uji *F-Chi-square* dengan cara membandingkan *Chi-square statistik* dan *Chi-square tabel*. Sebelum membandingkan *F Chi-square statistik* dan *Chi-square tabel* terlebih dahulu dibuat hipotesisnya. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H0 : Model *Random Effect*

H1 : Model *Fixed Effect*

Correlated Random Effects - Hausman Test

Test cross-section random effects

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 0.000000 | 3 | 1.0000 |

Sumber: data sekunder diolah, 2014

Diketahui bahwa nilai *Chi-square* sebesar 0.000000, dengan membandingkan *Chi-square tabel* pada d.f (3) $\alpha = 5\%$ adalah 12.838 dan nilai *Chi-square* hasil pengujian, maka diperoleh kesimpulan menolak H₁ dan menerima H₀ karena nilai *Chi-square* hasil pengujian lebih kecil dari *Chi-square tabel*. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka pendekatan yang lebih baik untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model (REM)*, sehingga berdasarkan *Hausman Test* model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model (REM)*.

Ikhtisar Pemilihan Model Akhir

Pada pemilihan model akhir yang digunakan dalam penelitian ini ialah antara model *Random Effectss* dan *Fixed Effectss*. Dalam pengujian yang dilakukan sebelumnya,

estimasi parameter dalam data panel menurut Uji *Hausman* akan lebih tepat menggunakan *Random Effects*. Maka, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Random Effects (FE)* atau MER. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja keuangan} = 0.838814 + 0.159153 \text{ PAD} + 0.171124 \text{ DAU} - 0.012469 \text{ BM} + e$$

Uji – F dan Interpretasi Hasil Analisis

Untuk menguji apakah variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikatnya, maka digunakan uji F dengan cara membandingkan F-statistik dengan F-tabel. Dari hasil regresi diperoleh nilai F- statistik 3.694844. Pada tingkat keyakinan $\alpha = 5\%$, $k = 4$, $n = 75$, sehingga diperoleh F-tabel dengan nilai $df_{12.838}$ yaitu 2.73.

Maka terlihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya bahwa variabel bebas (Rasio PAD, Rasio DAU, dan Belanja Modal berpengaruh secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel terikatnya (kinerja keuangan) pada tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha = 5\%$) (Lampiran 9), atau secara bersama-sama Rasio PAD, Rasio DAU, dan Belanja Modal dapat dijadikan /mekanisme *good governance* untuk meningkatkan efisiensi keuangan (kinerja keuangan) pada pemerintah daerah.

Uji – t dan Interpretasi Hasil Analisis

Pengujian ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, termasuk intersep, secara individu. Pengujian hipotesis melalui uji statistik t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh individu masing-masing variabel independen dalam model terhadap variabel dependennya. Selain menguji signifikansi dengan *probability (t-test) (Random Effect Model)* dengan α sebesar 5%.

Hasil pengujian regresi atas model penelitian ini menunjukkan variable independen dinilai berpengaruh positif signifikan kurang dari 0,05 yaitu variabel Rasio DAU ($\text{prob} = 0.0016$) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi DAU (tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat) maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi keuangan (kinerja

keuangan) pemerintah daerah. Karena semakin tinggi DAU yang diperoleh pememerintah daerah, maka pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam melaksanakan tugas pelayanannya kepada masyarakat karena diawasi oleh pemerintah pusat. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriarsi (2012), dan penelitian Marfiana dan Kurniasih (2011) bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dalam bentuk DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Variabel Rasio PAD ($\text{prob} = 0.4199$) tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa peran PAD dalam meningkatkan efisiensi keuangan (kinerja keuangan) pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan belum dapat berfungsi dengan semestinya, sejalan dengan penelitian Marfiana dan Kurniasih (2011) bahwa tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan menggunakan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total realisasi pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriarsi (2012), namun hal ini dapat diterima karena mengingat sangat kecilnya porsi PAD terhadap total pendapatan daerah dan juga besarnya porsi DAU pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.

Variabel BM ($\text{prob} = 0.9362$) tidak signifikan terhadap efisiensi keuangan (kinerja keuangan) pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Hasil ini menunjukkan bahwa peran BM dalam meningkatkan efisiensi keuangan (kinerja keuangan) pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan belum dapat berfungsi dengan semestinya. Hasil ini dapat diterima karena masih tingginya porsi BM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan terhadap total belanja daerah. BM sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. BM yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang

dibangun, sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka untuk jangka menengah/panjangnya akan berdampak peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya/bertambahnya PAD yang diterima pemerintah daerah dari investasi modal yang telah dilakukan sehingga kinerja daerah akan lebih baik.

Secara keseluruhan model dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 0.838814 + 0.159153PAD + 0.171124DAU - 0.012469BM + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta (α) sebesar 0.838814 menunjukkan jika ada variabel independen (nilai = 0), maka variabel dependen efisiensi keuangan (kinerja keuangan) pemerintah daerah akan ada sebesar 0.838814%. Koefisien Rasio PAD (kekayaan daerah) adalah 0.159153 positif yang mengidentifikasikan bahwa setiap penambahan rasio PAD (kekayaan daerah) sebesar 1% maka efisiensi keuangan (kinerja keuangan) pemerintah daerah akan bertambah 0.159153%. Koefisien Rasio DAU (ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat) adalah 0.171124 positif yang mengidentifikasikan bahwa setiap penambahan rasio DAU (ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat) sebesar 1% maka efisiensi keuangan (kinerja keuangan) pemerintah daerah akan bertambah 0.171124. Koefisien Belanja Modal (BM) adalah -0.012469 negatif yang mengidentifikasikan bahwa setiap penambahan rasio BM (investasi aset modal) sebesar 1% maka akan menurunkan efisiensi keuangan (kinerja keuangan) pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan sebesar -0.012469%

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dan Interpretasi Hasil Analisis

Koefisien determinasi dinotasikan R^2 . Koefisien ini merupakan suatu ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya.

Koefisien determinasi (R^2) berguna untuk mengukur seberapa besar variasi variabel independen yaitu Rasio PAD (kekayaan

daerah), Rasio DAU (ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat), Belanja Modal secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen yaitu efisiensi keuangan (kinerja keuangan) pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Hasil pengujian R^2 dan *adjusted* R^2 nilai R^2 0.278514 antara nol dan satu. Nilai *adjusted* R^2 0.203135 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil regresi Model *Random Effectss* (RE) untuk variabel dependennya adalah efisiensi keuangan (kinerja keuangan) pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen efisiensi keuangan (kinerja keuangan) pemerintah daerah sebesar 20.31% dan sisanya sebesar 79.69% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi dalam penelitian. Hasil penelitian ini memiliki R^2 yang lebih besar dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasisari (2012), pada penelitian tersebut nilai *adjusted* R^2 sebesar 0.094 atau 9.4% dan lebih kecil dari penelitian yang dilakukan oleh Marfiana dan Kurniasih (2011), pada penelitian tersebut nilai *adjusted* R^2 sebesar 22.6%.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2012 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan estimasi Rasio Pendapatan Asli Daerah (kekayaan daerah) tidak signifikan terhadap efisiensi keuangan (kinerja keuangan) pemerintah daerah,

pemerintah daerah dengan PAD yang besar seharusnya mampu memberikan kinerja yang baik. Jika pemerintah daerah memiliki PAD yang besar namun efisiensi keuangan (kinerja keuangan)-nya dinilai masih buruk maka pemerintah daerah tersebut mesti melakukan perbaikan ke depannya. Pemerintah daerah dengan PAD yang besar memiliki kewajiban yang lebih besar pula kepada masyarakat untuk lebih baik dalam mengelola dan menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk perbaikan kinerja.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)
Berdasarkan estimasi Rasio DAU (ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi keuangan (kinerja) pemerintah daerah. DAU Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan rata-rata memiliki persentase yang tinggi. Hasil ini menjadikan suatu gambaran bagi pemerintah daerah bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan selalu diawasi oleh pemerintah pusat sehingga mampu memberikan kinerja yang baik pula.
3. Belanja Modal (BM)
Berdasarkan estimasi Rasio Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi keuangan (kinerja keuangan) pemerintah daerah. Hal ini dapat diterima dikarenakan masih tingginya porsi BM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan terhadap total belanja daerah. Semakin tinggi tingkat porsi BM terhadap total belanja daerah maka dalam jangka menengah/panjang akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan PAD dari investasi modal tersebut sehingga berimplikasi pada kinerja pemerintah daerah yang lebih baik.
4. Berdasarkan Model *Random Effect Model* (REM)
Dihasilkan bahwa Rasio PAD (kekayaan daerah), dan Rasio Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan rasio DAU (ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Abdullah, Syukriy dan Jhon Andra Asmara. 2006. "Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik". *Paper disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi 9*, Padang -26 Agustus 2006. K-ASPP 01.
- Adi, Priyo Hari. 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah". *Procedding Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Ajija, Shochrul R, dkk.. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat
- Almilia, Luciana Spica dan Retrinasari, Ikka. 2007. *Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ*. *Proceeding Seminar Nasional Inovasi dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis*. FE Universitas Trisakti Jakarta, 9 Juni 2007.
- Arif, Bachtiar dan Muchlis, Iskandar. 2009. *Akuntansi pemerintahan*. Penerbit Akademia: Jakarta.

- Asngari, Imam. 2013. *Modul Pelatihan Econometrics*. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (tidak dipublikasikan).
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Batafor, Gregorius Gehi. 2011. *Evaluasi kinerja keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT*. Tesis Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar (tidak dipublikasikan).
- Bisma, I Dewa Gde dan Susanto, Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*. Jurnal GeneÇ Swara Edisi Khusus Vol.4, No.3. Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Mataram.
- Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Bruijn, Hans De. 2002. *Performance Measurement in The Public Sector: Strategies to Cope With The Risk of Performance Measurement*. Emerald Insight.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks: Jakarta.
- Devas, Nick dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. UI Press. Jakarta.
- Djayasinga, Marselina. 2007. *Riset Anggaran Untuk Rakyat (Studi Kasus APBD Kota Bandar Lampung)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 12 No. 1.
- Fitriyanti, Ismi Rizky dan Pratolo, Suryo. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi*. Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 5. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 2001. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4 Cetakan 3. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Governmental Accounting Standar Boards (GASB). 1994. *Concepts statement No. 2 Service Efforts and Accomplishments*.
- Greiling, Dorothea. 2005. *Performance measurement in the public sector: the German experience*. Emerald Research, Vol. 54: 551-567.
- Gujarati, Domandar N dan Porter, Dwan C. 2004. *Dasar- Dasar Ekonometrika*, Buku I Edisi 5. Salemba empat. Jakarta.
- Halachmi, Arie. 2005. *Performance measurement is only one way of managing performance*. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol. 54: 502-516.
- Hadi, Abdul, Hendri, Sapto, dan Inapty, Biana Adha. 2009. *Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Penelitian keuangan akuntansi sektor

- publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
- Hamzah Ardi, 2008. "Analisa kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, Pengangguran, dan kemiskinan: pendekatan analisis jalur (studi pada 29 kabupaten dan 9 kota di propinsi Jawa timur Periode 2001 – 2006)". *Konferensi Penelitian, Simposium Nasional Akuntansi XI: Pontianak*.
- Handra, Hefrizal dan Maryati, Sri. 2009. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatra Barat*. Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II Badan Litbang Departemen Dalam Negeri.
- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Anggaran daerah dan "fiscal stress" (sebuah studi kasus pada Anggaran daerah provinsi di Indonesia)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.
- Hasibuan, Abdul Nasser. 2009. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia*. Tesis Universitas Sumatera Utara (tidak dipublikasikan).
- Hidayat, Mochamad Fajar. 2013. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang.
- Kelly, Roy. 1999. *Intergovernmental Revenue Allocation Theory and Practice: an Application to Nepal*. *Asian Journal of Public Administration* Vol. 21 No. 1: 86-113. June 1999.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta. Erlangga.
- Kusumawardani, Media. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. *Accounting Analysis Journal* 1. Universitas Negeri Semarang.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Liestiani, A. (2008). *Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2006*. Skripsi Sarjana FEUI .
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi 2. Yogyakarta: Unit Penerbit dan

- Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press: Yogyakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Marfiana, N., dan Kurniasih, L. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mustikarini, Widya Astuti., Fitriasari, Debby. 2012. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007". *Simposium Nasional Akuntansi XV*: Banjarmasin.
- Nolan, James F, Moore, Adrian, dan Segal, Geoffrey. 2003. "Putting out the trash: measuring municipal service efficiency in U.S. cities". *Working Paper Series*. SSRN September.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.
- Nugroho, Fajar dan Rohman, Abdul. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapat Asli Daerah Sebagai Variabel Inter Vening Provinsi Jawa Tengah*. Vol.1 No.2, ISSN: 1-14.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Perwitasari, Citra. 2010. *The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government*. Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta (tidak dipublikasikan).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Vol. 8 No. 2.
- Puspita, Rora., Martani, Dwi. 2012. "Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Website Pemda Tahun 2010". *Paper dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi 15*, Balikpapan, 20-21 September 2012.
- Realisasi APBD Tahun 2012 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dalam: www.djpk.depkeu.go.id

- Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Edisi Ketiga, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rosdini, Dini. 2008. *Akuntansi Pendapatan dan Belanja Bagi Pemerintah Daerah*. Makalah. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Sadjiarto, Adjie. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.2 No. 2, Nopember 2000: 138–150.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uman. 2006. *Research Methods for Business : “Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhardjanto, D, Rusmin, Mandasari, Putriesti and Brown, Alistair. 2010. *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities*. *Journal Public Policy*. January 2010.
- Suhardjanto, D., Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 8/No.1/November 2011: 1-194.
- Sularso, Havid dan Restianto, Yanuar. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*. *Media Riset Akuntansi*, Vol 1, No 2.
- Supranto, J. 2009. *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jilid 1 Edisi 7. Erlangga: Jakarta.
- Suyana Utama, Made. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2001 – 2006*. *Buletin Studi Ekonomi*., Vol 14, Nomor: 2 Tahun 2009. ISSN 1410 – 4628.
- Westin, Susan S. 1998. *Performance Measuremnt and Evaluation Definition and Relationship*. GAO issued May 2005.
- Wibisono, Yusuf. 2005. *Metode Statistika*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. 2009. *Paradigma Hukum dan Demokratisasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Wood, L. 1998. *Local Government Dollars & Sense* (Rancho Palos Verdes, CA.: Training Shoppe).
- Yustikasari, Yulia dan Darwanto. 2007. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1 – 25.60.